

Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab/ Kota Propinsi Sumatera Utara

Riva Ubar Harahap

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Riva.ubar@yahoo.com

Abstrak

The purpose of this study is to test and analyze the influence of special allocation fund, and general allocation fund both simultaneously and partially on the human development index. This study uses secondary data in the form of panel data (pooled data) from 33 districts / cities. The data analysis model used to test the hypothesis in this study is multiple linear regression (Multiple Regression Analysis). The results of statistical testing can be concluded that general allocation fund and special allocation fund affect human development index (HDI) simultaneously. Likewise, the test results prove that general allocation fund partially affects the human development index (HDI). The results of the special allocation fund testing also partially influence the human development index (HDI). This study does not separate the allocation of special allocation fund in fields such as education, health, roads, irrigation, clean water, maritime affairs and fisheries and agriculture. In addition, the allocation of special allocation fund per sector in each region varies depending on the national development priorities determined by the central government and the Regional Government.

Keywords: General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Human Development Index

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana alokasi khusus, dan umum alokasi dana keduanya secara bersamaan dan sebagian pada indeks pembangunan manusia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk panel data (data yang terkumpul) dari 33 Kecamatan / kota. Model analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam studi ini adalah multiple regresi linear (analisis regresi). Hasil pengujian Statistik dapat disimpulkan bahwa dana alokasi Umum dan dana alokasi khusus mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) secara bersamaan. Demikian juga, hasil tes membuktikan bahwa dana alokasi umum sebagian mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM). Hasil pengujian dana alokasi khusus juga sebagian mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM). Studi ini tidak terpisah alokasi dana alokasi khusus di bidang pendidikan, Kesehatan, jalan, irigasi, air bersih, Kelautan dan Perikanan dan pertanian. Selain itu, alokasi dana alokasi khusus per sektor di setiap daerah bervariasi tergantung pada prioritas pembangunan nasional yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Dana alokasi umum, dana alokasi khusus, indeks pembangunan manusia

Pendahuluan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibuat dan dipopulerkan oleh Program Pembangunan PBB atau UNDP sejak tahun 1990 dalam seri laporan tahunan yang diberi judul "Human Development Report". Indeks ini disusun sebagai salah satu dari indikator alternatif, selain pendapatan nasional per kapita, untuk menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara. Indeks Pembangunan Manusia ini meranking semua negara dengan skala 0 (nol) sampai 1 (satu). Angka nol menyatakan tingkat pembangunan manusia yang paling rendah dan angka 1 menyatakan tingkat pembangunan manusia yang paling tinggi.

Ada tiga indikator yang dijadikan tolok ukur untuk menyusun Indeks Pembangunan Manusia. Pertama, usia panjang yang diukur dengan rata-rata lama hidup penduduk atau angka harapan hidup di suatu negara. Kedua, pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang bisa membaca (diberi bobot dua pertiga) dan rata-rata tahun sekolah (diberi bobot sepertiga). Ketiga, penghasilan yang diukur dengan pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan daya belinya untuk tiap-tiap negara. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia yang telah disusun, maka bisa ditetapkan tiga kelompok negara. Pertama, negara dengan tingkat pembangunan manusia yang rendah bila IPM-nya berkisar antara 0 sampai 0,5. Negara yang masuk kategori ini sama sekali atau kurang memperhatikan pembangunan sumber daya manusia. Kedua, negara dengan tingkat pembangunan manusia sedang jika IPM-nya berkisar antara 0,51 sampai 0,79. Negara yang masuk dalam kategori ini mulai memperhatikan pembangunan sumber daya manusianya. Ketiga, negara dengan tingkat pembangunan manusia tinggi jika IPM-nya berkisar antara 0,80 sampai 1. Negara yang masuk dalam kategori ini sangat memperhatikan pembangunan sumber daya manusianya.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bagian penjelasan pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa jumlah penduduk merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap daerah. Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui lebih lanjut seberapa besar pengaruh keuangan daerah terhadap indeks pembangunan manusia.

Badan Program Pembangunan di bawah PBB (*United Nations Development Programme/UNDP*) dalam laporan Human Development Report 2016 mencatat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2015 berada di peringkat 113, turun dari posisi 110 di tahun 2014. UNDP menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah untuk menyelesaikan kesenjangan yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap IPM. Penasehat Teknis Bidang Demokrasi Pemerintahan dan Satuan Penanggulangan Kemiskinan UNDP Indonesia, Juliaty Ansye Sopacua mengatakan, selama ini sejumlah langkah pengurangan kesenjangan memang sudah ada di program Nawacita Jokowi. Hanya saja, jurang kesenjangan belum benar-benar menyempit. Masih ada kesenjangan, sedangkan pembangunan manusia tidak bisa dicapai kalau setengah dari populasi tidak membaik (CNN Indonesia, Jumat 10 Nopember 2017).

UNDP mencatat, IPM Indonesia 2015 sebesar 0,689 dan berada di tingkat 113 dari 188 negara di dunia. IPM ini meningkat sekitar 30,5 persen dalam 25 tahun terakhir. Namun, di saat yang bersamaan, UNDP melihat ada sejumlah indikator kesenjangan yang bertolak belakang dengan peningkatan IPM tersebut. Pertama, tingkat kemiskinan dan kelaparan. UNDP mencatat, ada sekitar 140 juta orang Indonesia yang hidup dengan biaya kurang dari Rp. 20.000 per hari dan 19,4 juta orang menderita gizi buruk. Kedua, tingkat kesehatan dan kematian, tercatat sebanyak dua juta anak di bawah usia satu tahun belum menerima imunisasi lengkap. Kemudian, angka kematian ibu sebanyak 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup.

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara pada September 2015 sebanyak 1.508.140 orang atau 10,79 persen. Angka tersebut bertambah sebanyak 44.470 orang bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di bulan Maret 2015 yang berjumlah 1.463.670 orang atau 10,53 persen. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumut, Wien Kusdiatmon mengatakan, selama periode Maret hingga September 2015, penduduk miskin di daerah pedesaan bertambah 16.010 orang dari 764.370 orang pada Maret 2015 menjadi 780.380 orang pada September 2015. Pada daerah perkotaan jumlah penduduk miskin bertambah 28.460 orang dari 699.300 orang pada Maret 2015 menjadi 727.760 orang pada bulan September. Penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2015

sebesar 10,51 persen, naik dibanding Maret 2015 yang sebesar 10,16 persen. Begitu juga dengan penduduk miskin daerah pedesaan yaitu 10,89 persen pada Maret 2015 naik menjadi 11,06 persen pada September 2015. (Tribun Medan, 4 Januari 2016).

Pembangunan di Indonesia pada daerah kabupaten dan kota sampai saat ini masih bergantung pada dana transfer dan pemerintah pusat. Kabupaten/kota baru berdiri yang berasal dari pemekaran pada awal pemerintahan bergantung kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Menurut Simanjuntak (2001) dalam Ndadari dan Adi (2008) walaupun otonomi sudah berjalan di tiap kabupaten dan kota namun pemerintah daerah belum sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat salah satunya dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah.

Tentu dalam hal ini kita ditugaskan untuk adil dalam melakukan pemerataan dana keseluruh daerah demi terjadinya pembangunan di daerah yang ada di Indonesia, sesuai dengan ayat Al-Quran Surah An – Nahl ayat 90 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), DAU, dan Dana Alokasi Khusus.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyebutkan pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketiga bagian tersebut mempunyai peranan dalam meningkatkan pembangunan di kabupaten/kota.

Uraian Teoritis

Pengertian Dana Alokasi Umum

Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara Pusat dan Daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah dengan kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umum (DAU) minimal sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri. Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.

Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep Fiscal Gap, dimana kebutuhan DAU suatu Daerah ditentukan atas kebutuhan Daerah (fiscal needs) dengan potensi Daerah (fiscal capacity). Dengan pengertian lain, DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan Daerah melebihi dari potensi penerimaan Daerah yang ada.

Untuk formula dan perhitungan DAU Tahun Anggaran (TA) 2001 (berdasarkan PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan) telah dialokasikan DAUTA 2001 kepada masing-masing Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan Keppres Nomor 181 Tahun 2000. Formulasi dan perhitungan DAU TA 2001 dianggap mengandung banyak kelemahan terutama menyangkut keadilan antar Daerah. Hal ini dapat dimaklumi mengingat proses tersebut merupakan proses awal/tahun pertama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Lebih lanjut menurut Darwanto dan Yustikasari (2007) hal tersebut menunjukkan terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.

Pengertian Dana Alokasi Khusus

Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah danayang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Oleh sebab itu DAK dicantumkan dalam APBD. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.

DAK ini akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik antara lain seperti pembangunan rumah sakit, jalan, irigasi, dan air bersih. DAK ini bisa disamakan dengan dengan belanja pembangunan karena digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas pelayanan publik berupa pembangunan sarana dan prasarana publik (Ndadari dan Adi, 2008). DAK digunakan sepenuhnya sebagai belanja modal oleh pemerintah daerah. Belanja modal kemudian digunakan untuk menyediakan aset tetap. Menurut Abdullah dan Halim (2004) aset tetap yang dimiliki dari penggunaan belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemda. Lebih lanjut Abdullah dan Halim (2006) menjelaskan bahwa biasanya setiap tahun pemda melakukan pengadaan aset tetap sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Menurut Abimanyu (2005) yang dikutip oleh Harianto dan Adi (2007) infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari-hari secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktifitasnya yang semakin meningkat dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, buta huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara

berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel india Amartya Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics dan sejak itu dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan HDI tahunannya. Digambarkan sebagai "pengukuran vulgar" oleh Amartya Sen karena batasannya . indeks ini lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan, dan indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

HDI mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia:

- a. hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran.
- b. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar , menengah , atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga).
- c. standard kehidupan yang layak diukur dengan GDP per kapita gross domestic product/ produk domestik bruto dalam paritas kekuatan beli purchasing power parity dalam Dollar AS.

Metode Penelitian

Model analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah regresi linier berganda (*Multiple Regression Analysis*) dengan persamaan sebagai berikut :

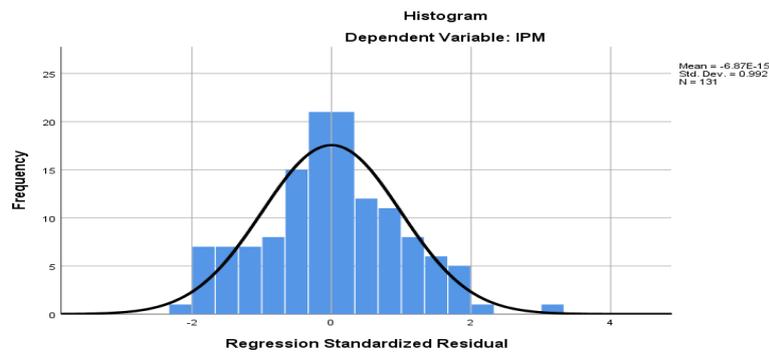
$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Y = Indeks Pembangunan Manusia
X₁ = Dana Alokasi Umum
X₂ = Dana Alokasi Khusus
a = Konstanta
b₁, b₂ = Koefisien Variabel
e = Error Term

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi di Sumatera Utara, yang terdiri dari 33 kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, dengan kriteria sampel yang dipilih adalah data DAU, DAK dan IPM yang lengkap dan pemekaran kab./kota dibawah tahun 2016. Data DAU dan DAK merupakan data tahun 2012, 2013, 2014, 2015 sedangkan data IPM merupakan data tahun 2012, 2013, 2014, 2015.

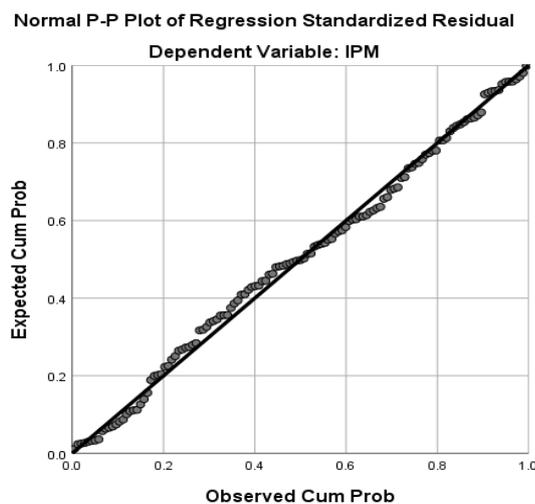
Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari grafik Histogram di atas dapat disimpulkan bahwa histogram menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 1. Histogram Uji Normalitas

Pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar tidak jauh disekitar garis diagonal, dari grafik normal plot di atas disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal dan regresi memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 2. Normal P-P Plot

Nilai *Durbin – Watson*(DW) sebesar 0.779, kriteria tidak terjadinya autokorelasi adalah $du < d < 4-du$, apabila sampel (n) = 132 maka hasilnya adalah $1,7466 < 1,779 < 2,26$, disimpulkan bahwa pengujian variabel tidak terdapat autokorelasi.

Tabel 1.
Hasil Uji Autokorelasi

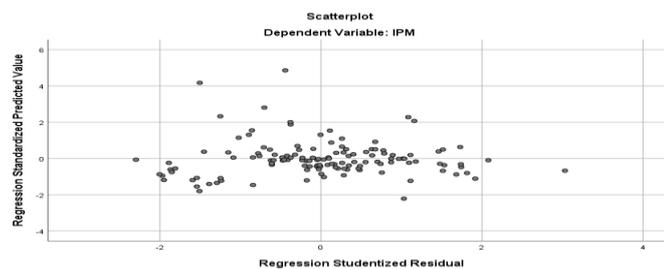
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.543 ^a	.295	.284	4.23424	1.779

a. Predictors: (Constant), DAK, DAU

b. Dependent Variable: IPM

Dari grafik Scatterplot terlihat titik menyebar secara acak (random) baik diatas maupun di bawah angka 0 sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.



Gambar. 3 Scatterplot.

DAU dan DAK masing memiliki nilai tolerance sebesar 0.731 dan VIF 1.368 maka dapat disimpulkan dari hasil pengujian nilai Tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai Tolerance < 0.10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95% dan dari hasil dari penilaian VIF tidak terdapat satu variabel independen yang memiliki nilai VIF > 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi ini

Tabel 2.
Coefficient Correlations

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	66.293	1.259		52.649	.000		
	DAU	1.163E-5	.000	.635	7.311	.000	.731	1.368
	DAK	.000	.000	-.336	-3.872	.000	.731	1.368

a. Dependent Variable: IPM

DAU dan DAK masing memiliki nilai coefesien correlations sebesar – 0.519 maka dapat disimpulkan dari hasil pengujian coefecient correlations kurang dari < 95% maka tidak terjadi multikolonearitas pada setiap variabel independen.

Tabel 3.
Nilai Tolerance dan VIF
Coefficient Correlations^a

Model		DAK	DAU
1	Correlations	DAK	1.000
		DAU	-.519
	Covariances	DAK	6.865E-10
		DAU	-2.162E-11

a. Dependent Variable: IPM

Dari tampilan model summary besarnya korelasi (R) memiliki nilai + 0.543 jadi hubungan antar variabel dependen yaitu IPM terhadap DAU dan DAK sebesar 54.3 % sehingga mempunyai korelasi positif kuat. Hasil Adjusted R² adalah 0,284, hal ini berarti 28,4 % variasi variabel dependen yaitu IPM dapat dijelaskan oleh variasi ke dua variabel independen yaitu DAU dan DAK. Sedangkan sisanya (100% - 28,4 % = 71.6%) di jelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

Tabel 4.
Koefisien Korelasi dan Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.543 ^a	.295	.284		4.23424	1.779

a. Predictors: (Constant), DAK, DAU

b. Dependent Variable: IPM

Hasil pengolahan data, diperoleh model regresi berganda yang berbentuk pada penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$IPM = 66.293 + 1,163DAU + 0,00 DAK + e$$

Tabel 5
Pengujian Statistik - t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	66.293	1.259		52.649	.000
	DAU	1.163E-5	.000	.635	7.311	.000
	DAK	.000	.000	-.336	-3.872	.000

a. Dependent Variable: IPM

Untuk mengetahui tingkat signifikansi dari masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji t - statistik adalah sebagai berikut :

1. H₁ dapat diterima, variabel DAU pada sig. 0,000 > α = 0.05. Artinya DAU memberikan pengaruh signifikan terhadap IPM secara parsial,
2. H₂ tidak dapat diterima, variabel DAK pada 0,000 > α = 0,05. Artinya, DAK memberikan pengaruh signifikan terhadap IPM secara parsial.

Tabel 6.
Pengujian Statistik - F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	958.439	2	479.219	26.729	.000 ^b

Residual	2294.882	128	17.929		
Total	3253.321	130			

a. Dependent Variable: IPM

b. Predictors: (Constant), DAK, DAU

Dari tabel 5.8 pengujian statistik – F nilai sig. $0,000 < \alpha, 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa DAU dan DAK mempengaruhi IPM secara simultan.

Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan penelitian yang diungkapkan sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hipotesis pertama, Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab/ Kota Provinsi Sumut secara parsial.
2. Hipotesis kedua, Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab/ Kota Provinsi Sumut secara parsial
3. Hipotesis ketiga, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab/ Kota Provinsi Sumut secara simultan.

Daftar Pustaka

Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Yogyakarta: *Jurnal Ekonomi STE1*No.2/Th. XIII/25/ April-Juni 2004: 90-109.

Abimanyu, Anggito. 2005. *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*. Bapekki Depkeu.

Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa Bali). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik* Volume 08, No. 01, February 2007. Page 1450 -1465.

CNN Indonesia, Jumat 10 Nopember 2017.

Departemen Keuanangan. <http://www.djpk.depkeu.go.id/document.php/document/article/108/69/>

Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap

Pengalokasian Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makasar 26 - 28 Juli 2007.*

Departemen Komunikasi dan Indormasi. 2008. Dana Alokasi Khusus Untuk Bantu Daerah Dalam Pembangunan.

http://balitbang.depkominfo.go.id/?mod=CLDEPTKMF_BRT01&view=1&id=BRT080212142301&mn=BRT0100%7CCCLDEPTKMF_BRT01

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2006. Sosialisasi Kebijakan dan Perhitungan Dana Perimbangan Tahun 2007.

<http://www.perbendaharaan.go.id/perben/modul/kegiatan/index.php?id=1860>

Erlina. 2008. Pengaruh Set Kesempatan Investasi terhadap Nilai Perusahaan : Peran Kebijakan Perusahaan dan Kepemilikan Manajerial. USU Press. Medan.

Erlina dan Sri Mulyani. 2007. *Metodologi Penelitian untuk Akuntansi dan Manajemen.* USU Press. Medan.

Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.* Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Hair, J.F., Anderson RE., Rolph, Tatham, R.L., dan Black, W.C. 1998. *Mutivariate Data Analysis.* 5th edition. Prentice-Hall Int.,Inc. NJ.

Hariato, David dan Priyo Hari Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas Makasar 26-28 Juli 2007.*

Irawan, Ari. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat dan Belanja Modal terhadap Pendapatan Perkapita Masyarakat di Kabupaten/Kota se- Provinsi Sumatera Utara. Tesis S2 Program Pascasarjana USU. Medan. (tidak dipublikasikan).

Lubis, Ade Fatma, Arifin Akhmad, dan Firman Syarif 2007. *Aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Soutions) untuk Penyusunan Skripsi dan Tesis.* USU Press. Medan.

Maimunah, Mutiara. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Packing 23-26 Agustus 2006.*

Ndadari, Laras Wulan dan Priyo Hari Adi. 2008. Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat. *The 2nd National Conference UKWMS Surabaya, 6 September 2008.*

- Nurlina. 2004. Analisis Pengaruh Anggaran Belanja Rutin dan Anggaran Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nanggroe Aceh Darussalam. Tesis S2 Program Pascasarjana USU. Medan. (tidak dipublikasikan).
- Rahmansyah, Armin. 2004. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi - Propinsi di Indonesia. Tesis S2 Program Pascasarjana USU. Medan. (tidak dipublikasikan).
- Ramzuhri. 2008. Pengaruh Pertumbuhan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten di Sumatera Utara. Tesis S2 Program Pascasarjana USU. Medan. (tidak dipublikasikan).
- Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.
- _____.2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____.2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- _____.2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- _____.2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Simanjuntak, Robert. 2001. Kebijakan Pungutan Daerah di Era Otonomi, Domestic Trade, Decentralization and Globalization : A One Day Conference, LPEM-UI, Jakarta.
- Sinullingga, Budi D. 2009. Analisis Pengaruh Alokasi Sektor Anggaran Pemerintah Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Kota Medan)
- Solin, Jonni Feber. 2007. Pengaruh Anggaran Sektor Pertanian, Pendidikan, Kesehatan, Transportasi dan Sektor Lainnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dairi. Tesis S2 Program Pascasarjana USU. Medan. (tidak dipublikasikan).
- Tribun Medan, 4 Januari 2016.
- Walidi. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Perkapita, Belanja Modal sebagai Intervening Variabel (Studi Kasus di Propinsi Sumatera Utara). Tesis S2 Program Pascasarjana USU. Medan. (tidak dipublikasikan).